

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGENDALIAN INTERN (Studi Pada BPR PermataArtha Surya Surabaya)

Anita Muktiasih Prabawanti
Moch Dzulkirom AR
Nengah Sudjana
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Email: anitasudewo@gmail.com

ABSTRACT

Bank in the implementation of the granting of required working capital credit system and accounting procedures that can improve internal control. Internal control has a role to keep the company operational activities so that the wealth of the company will continue to run. The purpose of this study was to determine the system and working capital lending procedures applied by the Rural Bank Permata Surya Artha Surabaya, as well as to determine whether the systems and procedures have improved the internal control. The focus of this research is the system and procedure of working capital loan to the Rural Bank Permata Surya Artha Surabaya by analyzing the existing aspects of the internal control. The results of data analysis showed that there are some things that need to be improved in the division of tasks and responsibilities undertaken by the Accounts Officer, necessitating the addition of personnel as a separate Credit Analyst. In addition, the implementation of a healthy practice, has never been the holding of a sudden inspection by internal auditor. Although not yet have an internal auditor, the directors should also carry out duties as internal auditor.

Keywords: *System and Accounting Procedures, Working Capital Loans, Internal Control*

ABSTRAK

Bank dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja dibutuhkan sistem dan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan pengendalian intern. Pengendalian intern memiliki peran untuk menjaga kekayaan perusahaan sehingga kegiatan operasional perusahaan akan tetap berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Permata Artha Surya Surabaya, serta untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur tersebut telah meningkatkan pengendalian intern. Fokus penelitian ini adalah sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Permata Artha Surya Surabaya dengan melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang ada pada pengendalian intern. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Account Officer, sehingga perlu penambahan personel sebagai Analis Kredit tersendiri. Selain itu, dalam pelaksanaan praktek yang sehat, belum pernah diadakannya pemeriksaan mendadak oleh pengawas intern. Meskipun belum memiliki pengawas intern, sebaiknya pihak direksi juga mengemban tugas sebagai pengawas intern.

Kata kunci : *Sistem dan Prosedur Akuntansi, Kredit Modal Kerja, Pengendalian Intern*

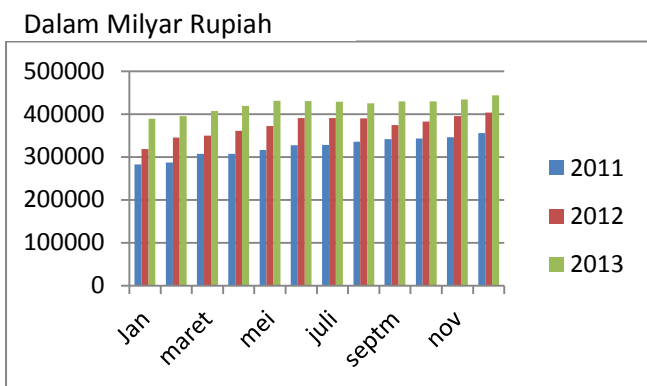
I. PENDAHULUAN

Kredit bank menurut kegunaannya terdiri dari kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif hanyalah pinjaman kredit kepada pemohon kredit yang hendak memenuhi

kebutuhan konsumsi mereka dan tidak menghasilkan nilai lebih. Selanjutnya kredit produktif yang diberikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemohon kredit yang akan menghasilkan nilai lebih bagi usaha yang dimiliki

[Type text]

pemohon kredit. Pada intinya kredit konsumtif adalah sarana pembiayaan konsumsi pribadi pemohon kredit seperti kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan motor, dan lain sebagainya, dan kredit produktif adalah sarana pembiayaan suatu usaha perusahaan berupa kredit modal kerja dan kredit investasi. Semakin maraknya peminjaman dana yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka akan turut meningkatkan permintaan kredit produktif. Dapat dilihat dari Gambar 1, bahwa terjadi peningkatan permintaan kredit modal kerja selama tiga tahun terakhir.



Gambar 1. Posisi Kredit Modal Kerja 2011-2013
(Sumber data diolah dari situs Otoritas Jasa Keuangan)

Bank dalam memberikan pinjaman kredit tidak terlepas dari unsur *profit* dan unsur keamanan. Sebagai salah satu kegiatan bisnis utama bank, keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit adalah bunga yang diberikan. Setiap bank memiliki bunga kredit yang bervariasi dengan mengikuti kebijakan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Selanjutnya pada saat bank setuju untuk memberikan pinjaman kredit, maka pihak bank harus mempertimbangkan keamanannya. Keamanan yang dimaksud adalah terjaminnya pengembalian pinjaman kredit yang diberikan.

Pemberian kredit modal kerja harus diberikan secara hati-hati karena dapat menimbulkan risiko kredit macet. Risiko kredit macet akan membawa kerugian bagi pihak bank. Risiko kredit bank dapat dilihat dari rasio *non performing loan (NPL)* yang tersedia di laporan keuangannya. NPL adalah kredit macet yang dialami oleh bank tersebut dimana debitur dianggap sudah tidak mampu untuk membayarnya.

Perlu adanya sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit untuk mencegah kredit macet. Sistem dan prosedur yang baik dalam pemberian kredit akan memudahkan proses permohonan

kredit bagi para nasabah. Selain itu, sistem dan prosedur pemberian kredit ini akan memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat permohonan kredit. Selanjutnya karyawan yang terkait dengan kegiatan pemberian kredit akan lebih mudah memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas, dan akan memudahkan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan karena informasi yang diperoleh jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Saat ini BPR Permata Artha Surya hanya melayani nasabah yang berasal dari grup perusahaan saja. Kegiatan operasionalnya secara umum sama dengan BPR yang lain, yaitu menyediakan tabungan, deposito, dan pemberian kredit. Pada tahun lalu BPR Permata Artha Surya mengalami kekosongan direksi selama setahun yaitu periode akhir 2012 sampai awal 2013. Kekosongan direksi ini dikarenakan direksi lama sudah saatnya rehat dari jabatan. Selama kekosongan tersebut, dewan komisaris menggantikan posisi direksi sementara. Pertengahan tahun 2013, dewan komisaris telah menunjuk dua direksi baru dari empat calon direksi yang dipilih dari luar lingkungan perusahaan.

Perkembangan perusahaan dapat dilihat dari nilai NPL Bank. Selama periode kepemimpinan direksi baru, nilai NPL Bank dapat diturunkan, namun nilai NPL masih diatas lima persen. Dapat dilihat pada tabel .1 berisi nilai NPL pada bulan Mei 2013 sampai April 2014. Direksi baru memiliki pedoman kebijakan perkreditan yang baru, dan diupayakan memberikan sistem dan prosedur pemberian kredit yang lebih baik dari sebelumnya.

Tabel 1. Nilai NPL

Bulan	NPL (dalam persen)
Mei	7,22
Juni	5,43
Juli	8,43
Agustus	8,51
September	8,87
Oktober	5,54
November	5,79
Desember	5,80
Januari	5,85
Februari	5,83
Maret	5,89
April	5,93

(Sumber : BPR Permata Artha Surya Surabaya)

Berdasarkan diskripsi yang dituangkan di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengamati dan menganalisis sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit pada BPR Permata Artha Surya Surabaya. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh BPR Permata Artha Surya Surabaya? Apakah sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh BPR Permata Artha Surya Surabaya telah diupayakan untuk peningkatan pengendalian intern ?

Melalui pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh BPR Permata Artha Surya Surabaya. Untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh BPR Permata Surya Surabaya telah diupayakan dalam peningkatan pengendalian intern.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kredit

Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Mac Leod dalam Firdaus dan Ariyanti (2009) menjelaskan kredit adalah suat reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang (Raymond P. Kent, dikutip oleh Suyatno dkk, 2003).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan utama bank untuk mendapatkan pendapatan melalui bunga dan biaya administratif yang

dikenakan kepada debitur. Pada intinya kredit diadakan untuk memberi pinjaman kepada debitur dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Untuk mendapatkan kepercayaan bank, maka debitur harus memberikan jaminan yang telah ditentukan.

Gazali dan Usman (2012) memaparkan bahwa “berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Firdaus dan Ariyanti (2009) menjelaskan bahwa “setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian dan minimal harus meliputi kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara penilaian suatu kredit, profesionalisme, dan integrasi pejabat perkreditan”.

Pemberian suatu kredit mengandung risiko kredit macet, akibatnya peminjam tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Ketika terjadi kredit macet, maka pihak bank harus melakukan penyelamatan sehingga kerugian-kerugian dapat dihindari ataupun diminimalisir. Menurut Kasmir (2002), penyelamatan yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut : *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi dan Penytiaan jaminan.

B. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasional suatu perusahaan atau merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Kredit modal kerja merupakan kredit produktif yang akan menghasilkan nilai lebih bagi perusahaan. Kredit modal kerja ini diberikan berdasarkan kelayakan bisnis perusahaan pemohon kredit.

“Kredit modal kerja menurut Thomas Suyatno (2003) adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini berupa pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi lainnya seperti upah buruh, biaya pengepakan, distribusi dan sebagainya. Tujuan kredit ini untuk

[Type text]

meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.”

C. Sistem Pengendalian Intern

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.(Mulyadi, 2001)

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dulu”.(Baridwan, 2002)

“Pengendalian internal adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansinya yang berlaku”. (Tuanakotta, 2013).

D. Pengendalian Intern Kredit

“Untuk menghindari kesalahan dan penyelewengan, perlu disusun suatu sistem pengendalian intern pemberian kredit yang memadai, agar hal-hal yang merugikan perusahaan dapat dihindari sedini mungkin”. (Budiyati, 2008)

“Pengendalian intern kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet” (Hasibuan, 2009).

Dari definisi tersebut artinya pengendalian intern kredit wajib dilaksanakan untuk menghindari risiko kredit macet. Dapat diartikan bahwa tujuannya kredit yang diberikan dapat tetap lancar dan produktif sehingga tidak macet. Selanjutnya bank dapat menghindari kerugian karena praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

Adapun tujuan pengendalian kredit menurut Hasibuan (2009) antara lain adalah :

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.

- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai analisis sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit modal kerja dalam upaya peningkatan pengendalian intern. Peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan pemberian kredit untuk menganalisis sistem dan prosedur yang diterapkan. Dalam penelitian ini, sistem dan prosedur akuntansi pemberian kredit akan dibahas secara detil dan spesifik untuk mengetahui upaya peningkatan pengendalian internnya. Oleh karena itu penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Fokus penelitian yang akan disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja.

Fokus pertama adalah peneliti akan melakukan analisis terkait dokumen, formulir dan jaringan yang akan membentuk prosedur pemberian kredit modal kerja pada BPR Permata Artha Surya. Selanjutnya prosedur yang ada dievaluasi serta diberikan saran perbaikan atas kelemahannya. Jaringan yang membentuk prosedur pemberian kredit modal kerja meliputi :

- a. Prosedur permohonan kredit
- a. Prosedur Analisa Kredit
- b. Prosedur Persetujuan Kredit
- c. Prosedur Perjanjian Kredit
- d. Prosedur Pencairan Kredit

2. Sistem Pengendalian Intern

Fokus kedua, peneliti ingin mengetahui dan menilai apakah sistem pengendalian intern yang diterapkan pada pemberian kredit oleh BPR Permata Artha Surya telah diupayakan dalam peningkatan pengendalian intern. Sistem pengendalian kredit modal kerja

[Type text]

ditunjang dengan pengendalian intern sebagai berikut:

- a. Analisis Struktur Organisasi dan Pemisahan Fungsi Tugas yang Jelas
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan
- c. Praktek – praktek yang sehat
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab

Analisis data merupakan tahap dimana dilakukannya analisa dari folus penelitian yang telah ditentukan.

1. Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Modal Kerja.
2. Analisis Sistem Pengendalian Intern
 - a. Analisis Struktur Organisasi dan Pemisahan Fungsi Tugas yang Jelas
 - b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan
 - c. Praktek – praktek yang sehat
 - d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Pada sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja BPR Permata Artha Surya, perlu ada beberapa perbaikan. Terkait dengan sistem yang digunakan masih manual, sebaiknya Direksi melakukan perbaikan dengan membeli atau menggunakan program sistem untuk pencatatan akuntansi. Pencatatan yang dilakukan secara manual bisa saja memicu terjadinya praktek yang tidak sehat, karena hanya mengandalkan kontrol dari atasan saja. Salah satu pegawai bisa melakukan manipulasi terhdap pencatatan yang dilakukannya. Komputer dengan sistem yang canggih akan menjadikan pekerjaan para karyawan menjadi lebih efektif. Pemberian kredit modal kerja akan lebih mudah dikontrol melalui sistem, sehingga cepat untuk diketahui kolektabilitasnya.

Prosedur pemberian kredit modal kerja sudah sesuai dengan kebutuhan BPR sendiri, dan sudah sesuai dengan standar pedoman kebijakan pemberian kredit BPR. Hanya saja diperlukan beberapa perbaikan pada Prosedur analisa kredit, sebaiknya yang melakukan analisa kredit adalah analis kredit. Analis kredit belum dimiliki oleh BPR Permata Artha Surya. Pada Prosedur survey, seharusnya surveyor tidak hanya melihat dan

memeriksa bersama AO. Surveyor lebih baik turut membuat laporan survey yang nanti akan diberikan kepada AO. Laporan yang akan dibuat oleh surveyor harus bersifat obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk AO.

Analisis Unsur Pengendalian Intern dalam Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

- a. Analisis Struktur Organisasi dan Pemisahan Fungsi Tugas

Setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang dapat menjelaskan fungsi tugas dengan jelas. Bank Perkreditan Rakyat Permata Artha Surya sesuai dengan kebutuhannya telah memiliki struktur organisasi yang memadai. Beberapa kali BPR Permata Artha Surya memperbaiki struktur organisasinya. Struktur organisasi yang digunakan BPR Permata Artha Surya telah mengacu pada SE/No.14/26/DKBU.

Tentu saja dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan harus ada pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas diberlakukan untuk dicapainya tujuan dari pengendalian intern, yaitu untuk menjaga kekayaan perusahaan. Pada pedoman kebijakan pemberian kredit pada lampiran SE/No.14/26/DKBU, mengatur bahwasannya setiap BPR wajib memiliki perangkat perkreditan yang jelas pemisahan tugasnya.

Bank Perkreditan Rakyat Permata Artha Surya telah berusaha mengatur pemisahan tugas dalam pelaksanaan pemberian kredit. Pemisahan tugas telah disesuaikan dengan standar pedoman kebijakan pemberian kredit. Dapat dilihat bahwa pegawai yang melaksanakan analisa kredit berbeda dengan pegawai pencairan kredit, serta administrasi kredit. Analisa kredit dilakukan oleh *Account officer* dan pencairan kredit dilakukan oleh teller, selanjutnya pembukuan transaksi khusus kredit dilakukan oleh Supervisor ADK yang akan dilanjutkan pembukuan oleh bagian akuntansi.

Meskipun struktur organisasi BPR Permata Artha Surya sudah baik, namun perlu ada beberapa perbaikan dalam struktur organisasi ini. Sebuah Bank Perkreditan Rakyat memang lebih sederhana daripada umum. Pemisahan tugas akan lebih efektif apabila tugas Analisa Kredit yang dikerjakan oleh AO

[Type text]

dilimpahkan kepada petugas Analisa Kredit sendiri. BPR Permata Artha Surya belum memiliki Analis Kredit sendiri. Adanya Analis Kredit dapat menghindari praktek yang tidak sehat oleh *Account Officer*. Gambar.3 adalah bagan struktur organisasi yang disarankan.

Penambahan personel analis kredit akan menanggung tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Memeriksa ulang kelengkapan dokumen
- 2) Menganalisa kelayakan usaha nasabah, melalui laporan keuangan perusahaan nasabah
- 3) Menganalisa kekayaan nasabah
- 4) Menganalisa kelayakan kredit berdasarkan 5C
- 5) Menentukan jumlah kredit yang layak diberikan
- 6) Menyimpulkan layak atau tidaknya diberikan kredit
- 7) Membuat Nota Akta Kredit

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan akuntansi pemberian kredit merupakan unsur pengendalian intern yang penting untuk diperhatikan. Sistem wewenang meliputi semua prosedur yang ada dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Prosedur pencatatan pemberian kredit modal kerja dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan wewenang masing-masing.

Bank Perkreditan Rakyat Permata Artha Surya memiliki sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang sederhana, namun masih dapat menunjang pengendalian intern. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *AO* memiliki wewenang yang cukup banyak dalam kegiatan pemberian kredit. Oleh karena itu, Direksi lebih baik menambahkan personel analis kredit untuk melakukan analisa kredit. Selanjutnya seharusnya *surveyor* dalam melakukan survey tidak hanya menemani *AO*, namun juga memberikan laporan hasil survey untuk dicocokkan dengan dokumen yang ada di *AO*.

c. Praktek – praktek yang sehat

Pengertian dari praktek – praktek yang sehat adalah setiap karyawan dalam perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Karyawan harus memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan

tugasnya, dengan tidak turut serta dalam pekerjaan karyawan yang lainnya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan supaya terlaksana praktek yang sehat dalam kegiatan operasional bisnis perusahaan. Kebijakan yang dibuat oleh Direksi dalam PKPB sudah cukup baik dan dapat menciptakan praktek yang sehat dalam bekerja.

Penggunaan formulir tercetak dengan nomor urut harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya oleh yang berwenang. Formulir yang tercetak dengan nomor urut tidak boleh sembarangan digunakan, dalam arti setiap penggunaannya harus jelas untuk tujuan penggunaan formulir tersebut. Pada BPR Permata Artha Surya, penggunaan formulir telah dilakukan dengan benar. Pihak yang menggunakan formulir berurut nomor cetak misalnya adalah teller, dimana hanya teller yang menggunakan slip bernomor urut dalam melaksanakan transaksi nasabahnya. Selain teller, tidak ada yang boleh meminta ataupun menggunakan formulir tersebut.

Sebagai pendukung pelaksanaan praktek yang sehat, seharusnya diperlukan pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan mendadak, karyawan akan semakin sadar untuk melaksanakan praktek yang sehat dalam bekerja. Kondisi yang ada pada BPR Permata Artha Surya belum memiliki Pengawas intern untuk melakukan pemeriksaan mendadak ataupun *surprised audit*. Selama ini pemeriksaan terhadap kinerja pegawai dilakukan oleh Direksi. Selain Direksi, pengawasan langsung dilakukan oleh para manajer. Meskipun tidak memiliki pengawas intern atau *internal auditor*, namun setiap tahunnya BPR ini menggunakan jasa *auditor eksternal* untuk memeriksa kondisi perusahaan pada tahun tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar biasanya dilakukan pada akhir tahun. Semakin besar pengembangan usaha BPR ini, akan semakin membutuhkan pengawasan lebih dalam kegiatan bisnisnya. Sebaiknya perlu diadakan pengawas intern yang bukan dari Direksi ataupun manajer, dimana tugasnya untuk mengawasi kegiatan karyawan apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Selanjutnya untuk semua karyawan mempunyai hak cuti meliburkan diri dari pekerjaan karena kepentingan pribadinya yang mendesak atau tidak dapat dihindari. BPR Permata Artha Surya memiliki kebijakan bahwa pihak yang meunjuk salah satu karyawan pengganti adalah Direksi. Karyawan pengganti untuk sementara mengambil alih tugas dan pekerjaan karyawan yang cuti. Tugas dan tanggungjawab dilimpahkan secara jelas, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, maka itu adalah tanggung jawab orang pengganti, dan bukan orang yang cuti.

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek keandalan catatan akuntansinya. Pemberian kredit modal kerja memiliki risiko tidak terbayarnya kembali pinjaman yang diberikan. Risiko ini bisa terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Debitur yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap kewajibannya
 - 2) Usaha debitur yang mengalami kerugian atau kebangkrutan
 - 3) Kelalaian *Account Officer* dalam menganalisis kelayakan kredit debitur
 - 4) Tidak adanya kontrol fisik atas usaha yang dimiliki debitur
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab

Manajemen perusahaan harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten, dalam arti perusahaan bisa menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan harus selektif dalam menempatkan karyawan dalam struktur organisasi, yaitu dengan menempatkan sumber daya manusia bermutu. Sumber daya manusia yang bermutu adalah sumber daya manusia yang dilatar belakangi pendidikan dan ketrampilan yang baik.

BPR Permata Artha Surya memiliki karyawan secara keseluruhan tidak lebih dari dua puluh orang. Dewan komisaris dalam perusahaan ini adalah orang-orang yang telah berkecimpung di dunia bisnis cukup lama. Kompetensi dewan komisaris sangatlah baik dalam memimpin jalannya perusahaan. Dewan komisaris cukup selektif dalam memilih Direksinya.

Sempat mengalami kekosongan Direksi setahun yang lalu, komisaris telah memilih

Direksi baru yang memiliki latar belakang yang baik. Menurut riwayatnya, kedua Direksi baru ini memiliki pengalaman yang cukup banyak di dunia perbankan. Selain pengalaman, Direksi baru ini memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga tidak perlu diragukan lagi mutu kerjanya.

Karyawan lainnya dibawah Direksi memiliki kompeten yang cukup baik pula, meskipun masih ada karyawan yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas. Meskipun ada beberapa pegawai yang tidak mengambil pendidikan keserjanaan, namun kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan manajemen. Program Direksi dalam mengembangkan mutu karyawannya adalah dengan mengikutkan para karyawan dalam seminar pendidikan perbankan. Setiap tahunnya para pegawai diikutkan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adanya pelatihan akan meningkatkan mutu karyawan dengan pengetahuannya yang semakin berkembang.

Secara keseluruhan, BPR Permata Artha Surya sudah memiliki karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, hanya perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas sumber daya manusianya. Terkait dengan laporan keuangan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, terutama pihak pengawas perbankan, bagian akuntansi harus benar-benar berkompeten.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh direksi. Hanya saja semua prosedur masih dilakukan secara manual menggunakan komputer dengan program seadanya.
2. Struktur Organisasi yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan, dan selama ini pemisahan fungsi tugas berjalan dengan baik. Hanya saja dalam struktur organisasi *Account Officer* memiliki tugas yang lebih banyak saat melaksanakan prosedur pemberian kredit modal kerja. pemisahan tugas yang sederhana akan memicu terjadinya praktek yang tidak sehat. Pihak AO memiliki peluang kerjasama dengan calon nasabah dengan memanipulasi Nota Analisa Kredit.

3. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dilakukan dengan fasilitas seadanya, dan pengawasan dari atasan langsung seperti manajer, dan direksi. Setiap harinya dilakukan pemeriksaan pencatatan antara atasan dan bawahan seperti bagian akuntansi dan manajer operasional.
4. Personel Bank Perkreditan Rakyat Permata Artha Surya selama ini telah melaksanakan praktek yang sehat. Semenjak pergantian direksi tahun lalu, pihak Bank belum pernah dirugikan atas praktek yang tidak sehat dari pegawainya. Meskipun Bank Permata Artha Surya adalah Bank perkreditan Rakyat milik grup, namun komisaris meletakkan orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan kegiatan operasional Bank, dalam arti tidak ada karyawan memiliki hubungan keluarga satu sama lain. Menjaga praktek yang sehat dalam bekerja, selama ini Perusahaan belum pernah diadakan pemeriksaan dadakan atau *surprised audit* oleh direksi. Pemeriksaan rutin dilakukan hanya setahun sekali dengan mengundang auditor dari luar.
5. Secara keseluruhan, BPR Permata Artha Surya sudah memiliki karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, hanya perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas sumber daya manusianya. Pelatihan juga telah dilakukan bagi karyawan baru dengan program *training* 3 bulan, dan bagi karyawan lama akan selalu didaftarkan pelatihan dari luar untuk mendapatkan pengetahuan baru. *Customer Service* diberi tugas dan wewenang untuk mengurus administrasi tabungan, dan mencatat memorandum pemberian kredit. *Customer Service* dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki riwayat pendidikan yang cukup. *Customer Service* disini hanyalah lulusan Sekolah Menengah Atas, seharusnya jabatan tersebut diisi oleh orang yang minimal berpendidikan Sarjana.
2. Sebaiknya Direksi harus mengusulkan kepada komisaris terkait penambahan personel, yaitu analis kredit yang bertugas untuk menganalisa kelayakan kredit yang akan diberikan.
3. Apabila menurut direksi, Bank belum membutuhkan *internal auditor*, maka seharusnya sesekali perlu diadakan *surprised audit* oleh direksi.
4. Perlu adanya *upgrading* karyawan, dengan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan keserjanaan kepada karyawan yang kebutuhannya mendesak. *Customer Service* harus menempuh pendidikan keserjanaan, dan apabila orang tersebut tidak mampu, lebih baik digantikan saja dengan orang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi*. Edisi kelima. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta
- Budiyati. 2008. "*Evaluasi Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali)*". Universitas Sebelas Maret Fakultas Ekonomika.
- Firdaus, Rachmad dan Ariyanti, Maya. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung : ALFABETA.
- Gazali, S Djoni dan Usman, Rachmadi. 2012. *Hukum Perbankan*. Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- Hasibuan S.P. Malayu. 2009. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2002. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi.2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta:Salemba Empat.
- Suyatno, Thomas, dkk.2003.*Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang No. 10/1998. "Tentang Perubahan UU. No. 7/1992 Tentang Perbankan", diakses pada Tanggal 22 februari 2014 dari <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp>

Saran

1. Perlu diadakan fasilitas sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan prosedur pemberian kredit modal kerja. Program sistem informasi pemberian kredit akan memudahkan karyawan dalam bekerja, serta memudahkan pengawasan. Adanya sistem informasi yang memadai, informasi perusahaan akan diolah secara akurat dan terpercaya.

[Type text]

